



Kepadatan Lalin di Jeron Beteng Dikurangi

JOGJA—Aktivitas kendaraan bermotor di kawasan Jeron Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bakal dibatasi.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

- ▶ Perubahan iklim global dipicu akumulasi emisi karbon yang terus-menerus dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.
- ▶ Dishub DIY memastikan penerapan Malioboro kawasan full pedestrian akan mulai diberlakukan pada 2026.

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah awal menekan emisi karbon sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan skema pembatasan kendaraan

pribadi akan diterapkan secara bertahap. Fokus awal diarahkan pada pengurangan akses kendaraan bermotor ke dalam area Jeron Beteng yang selama ini kerap dipadati lalu lintas. "Wilayah Jeron Beteng akan menjadi titik

awal pengurangan emisi karbon. Saat ini kondisinya sangat padat karena mayoritas masyarakat masuk menggunakan kendaraan pribadi," ujar Erni, Minggu (1/2).

▶ Halaman 10

Kepadatan Lalin...

Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Mengingat kawasan Jeron Beteng merupakan wilayah permukiman padat sekaligus kawasan budaya yang berada di bawah otoritas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, Dishub DIY akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Kraton guna merumuskan tahapan penerapan yang tepat. "Pembatasan kendaraan ini harus melalui kesepakatan bersama Kraton. Tidak bisa langsung diberlakukan, perlu proses dan tahapan yang matang," ujarnya.

Erni menjelaskan pembatasan tidak berarti melarang total kendaraan milik warga. Pemerintah hanya akan mengatur akses kendaraan pribadi ke titik-titik tertentu di kawasan tersebut. Ia juga mengingatkan kembali kebiasaan lama masyarakat yang sebelumnya mematikan mesin sepeda motor saat memasuki wilayah perkampungan di Jeron Beteng. "Dulu ada kesadaran untuk mematikan mesin saat masuk kampung, itu sebenarnya sudah berkontribusi menekan emisi. Sekarang kendaraan malah langsung masuk sampai ke dalam kampung. Ini yang ingin kami kembalikan," jelasnya.

Dalam penyusunan teknis kebijakan, Dishub DIY akan melibatkan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM serta sejumlah pihak terkait lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan sebelum kebijakan resmi diterapkan.

Perubahan Iklim

Peneliti Pustral UGM, Ikaputra menilai kejadian kebencanaan yang timbul dari angin kencang dan hujan dengan intensitas

tinggi yang terjadi di DIY dalam beberapa waktu belakangan sebagai bentuk nyata dari perubahan iklim. "Kita punya badai topan [angin kencang] di Jogja. Walaupun datanya tercatat puluhan pohon tumbang, faktanya ada korban jiwa dan kebetulan terjadi di sekitar UGM. Ini bukti bahwa isu perubahan iklim itu nyata," katanya.

Ia menilai perubahan iklim global dipicu akumulasi emisi karbon yang terus-menerus dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, termasuk sektor transportasi sebagai penyumbang utama pencemaran udara di kawasan perkotaan. "Penyebabnya sederhana, emisi karbon dari knalpot kendaraan, transportasi, industri, bahkan aktivitas rumah tangga. Kalau kendaraan itu dinyalakan bersamaan, itu racun. Satu-satunya jalan agar bencana anomali tidak terus terjadi adalah mengurangi emisi," jelasnya.

Karena itu, dia mendorong langkah-langkah konkret untuk menekan emisi, salah satunya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, terutama untuk perjalanan jarak dekat di kawasan budaya dan wisata. Ia pun mendorong agar kawasan Jeron Beteng menjadi kawasan rendah emisi. Hal tersebut menurutnya lantaran praktik hidup berdampingan dengan alam yang mendorong penurunan emisi di kawasan tersebut telah diterapkan sejak beberapa waktu lalu. "Masuk ke kompleks Kraton tidak ada kendaraan bermotor, semua jalan kaki, tidak bising, bisa mendengar kicauan burung. Ini sudah dipraktikkan sejak zaman Mangkubumi I," katanya.

Menurutnya, filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memperindah

dan menjaga Bumi telah lama tercermin dalam tata ruang dan perilaku masyarakat di sekitar Kraton, termasuk kampung-kampung di kawasan Taman Sari yang dahulu membatasi kendaraan bermotor masuk gang.

Dorongan Pustral UGM tersebut menurutnya sejalan dengan kebijakan Pemda DIY dalam penerapan Malioboro full pedestrian, yang menargetkan penurunan emisi di kawasan tersebut.

Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, Aryanto Hendro Suprantoro, menyampaikan upaya mewujudkan kawasan nol emisi sejalan dengan nilai-nilai Sumbu Filosofi Jogja yang telah berusia ratusan tahun. "Sumbu Filosofi selalu menginspirasi. Hari ini kita melihat bentuk inspirasi nyata untuk menciptakan lingkungan nol emisi. Semoga nilai-nilai ini terus menjaga peradaban Kota Jogja," katanya.

Full Pedestrian

Di sisi lain, Dishub DIY memastikan penerapan Malioboro kawasan full pedestrian akan mulai diberlakukan pada 2026. Dengan adanya kebijakan tersebut, Dishub DIY menegaskan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM), termasuk becak motor (betor) dan Maxride dilarang melintas di Jl. Malioboro.

Erni mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemda DIY untuk mengurangi emisi karbon dan peningkatan kualitas udara di kawasan Malioboro. "Kalau Malioboro sudah full pedestrian, kendaraan yang masih menggunakan BBM tentu tidak bisa masuk. Itu termasuk betor dan kendaraan bermotor lainnya," ujar Erni.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005